



WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 281 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

WALI KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang. . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

9. Peraturan. . .

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 543);
13. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Batam Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 6);
15. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 35 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Batam Nomor 1605);

MEMUTUSKAN. . .

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.
- KESATU : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, kondisi lingkungan strategis Daerah dan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan I tahun berjalan.
- KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- a BAB I PENDAHULUAN
 - b BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I
 - c BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
 - d BAB IV PENUTUP
- KETIGA : Penjabaran Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XLV Keputusan ini.
- KEEMPAT : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA menjadi:
- a. acuan penyusunan Perubahan RKA-Perangkat Daerah;
 - b. landasan penyusunan KUA Perubahan dan PPAS Perubahan untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2025; dan
 - c. bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan untuk memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan telah disusun berlandaskan Perubahan RKPD.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam.

KEENAM. . .

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 8 Juli 2025

WALI KOTA BATAM,

AMSAKAR ACHMAD



LAMPIRAN XXV : KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM
NOMOR : 281 TAHUN 2025
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN, DAN PERTAMANAN TAHUN
2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS
PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTAMANAN
TAHUN 2025





DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN
K O T A B A T A M

PERUBAHAN RENCANA KERJA

TAHUN 2025



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN

Jl. Kartini I No 29, Sungai Harapan - Sekupang
Telp. (0778) 8014473 Fax. (0778) 8014473



Jl. Kartini I No. 29 Sei. Harapan
Sekupang, Batam
Kode Pos. 29425
Telepon (0778) 8016062, Faksimile
(0778) 8016062

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya maka Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertamanan Kota Batam Tahun 2025 dapat terselesaikan.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertamanan Kota Batam memuat rumusan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertamanan Tahun Anggaran 2025 yang mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertamanan Kota Batam Tahun 2025-2029.

Dalam mendorong efektivitas pemerintahan dan pembangunan saat ini, kondisi serius yang perlu dipertimbangkan dalam setiap pengambilan keputusan adalah kecenderungan lingkungan yang berlangsung pesat dan terus berubah sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Perkembangan lingkungan strategis tersebut akan mempengaruhi perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebijakan dalam pengambilan keputusan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Untuk mengantisipasi perkembangan tersebut, maka setiap organisasi akan dituntut terus melakukan adaptasi dan inovasi, agar tetap memiliki peran dalam lingkungan yang senantiasa berubah tersebut, sehingga pencapaian target dan sasaran pembangunan dapat terwujud melalui penyempurnaan kebijakan, program dan kegiatan.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan terlibat dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertamanan Kota Batam Tahun 2025, semoga Perubahan Renja ini bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Batam, 01 Juli 2025

Kepala Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertamanan Kota Batam



Drs. Elyudhi Apriadi
Pembina Utama Muda
NIP. 196904251989091001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... ii

DAFTAR TABEL iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 3

1.4 Sistematika Penulisan 3

BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I

2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 5

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 13

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 14

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 16

BAB IV PENUTUP

4.1 Catatan Penting 28

4.2 Kaidah - Kaidah Pelaksanaan 28

4.3 Rencana Tindak Lanjut..... 28

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
Tahun 2025 s/d Triwulan I..... 6

Tabel 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 13

Tabel 3.1 Rincian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu pada
Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 17

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Berdasarkan Pasal 276 (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 343 (1) disebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Pada pasal Pasal 351 dan 352 disebutkan bahwa berdasarkan Perubahan RKPD yang telah memperoleh persetujuan Kepala Daerah, Kepala Daerah menerbitkan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada surat edaran dan Perubahan RKPD.

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada:

- a. Perubahan RKPD;
- b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi, kabupaten/kota sampai dengan Triwulan I Tahun berkenaan.

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah terdiri atas:

- a. Perumusan Perubahan Renja Perangkat Daerah; dan
- b. Penyajian Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Perumusan Perubahan Renja Perangkat Daerah mencakup:

- a. analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- b. analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I tahun berkenaan; dan
- c. penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Perubahan Renja Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

- a. pendahuluan;
- b. evaluasi Renja sampai dengan Triwulan I tahun berkenaan;
- c. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah;
- d. penutup.

Berdasarkan Surat Edaran Walikota Nomor 07/000.7.2/IV/2025 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025, maka Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertamanan Kota Batam menyusun Perubahan Rencana Kerja yang berpedoman kepada Perubahan RKPD Tahun 2025, setelah melakukan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I tahun 2025.

Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Adapun landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Renja Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertamanan Kota Batam Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Tahun 2025;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2021 - 2026
12. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 213 Tahun 2022 Tentang Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Tahun 2021 - 2026;
14. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 35 Tahun 2025 tentang Perubahan RKPD Kota Batam Tahun 2025 tanggal 11 Juni 2025;
15. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 29 Tahun 2024 tentang Satuan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, dan Sistem Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertamanan Kota Batam;
16. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 35 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2025

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertamanan Kota Batam Tahun 2025 adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu satu tahun sebagai penjabaran dari Rancangan Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertamanan Tahun 2025 - 2029 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertamanan Kota Batam Tahun 2025 yaitu:

- 1) Penyesuaian terhadap proiritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah dalam mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah.
- 2) Sebagai pedoman dan arah dalam menyusun perubahan anggaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertamanan Tahun 2025 dan sebagai dasar penentuan Perubahan KUA dan PPAS, serta Perubahan RKA Tahun Anggaran 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyajian Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertamanan Kota Batam terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 2.1 Landasan Hukum
- 3.1 Maksud dan Tujuan
- 4.1 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I (TAHUN BERJALAN)

- 2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I (Tahun Berjalan)
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

	2.3	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
BAB III		RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV		PENUTUP
	4.1	Catatan Penting
	4.2	Kaidah Pelaksanaan
	4.3	Rencana Tindak Lanjut

BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Evaluasi bertujuan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari pelaksanaan kinerja terhadap Renja tahun berjalan, selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun sebelumnya. Realisasi Renstra mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan dan/atau realisasi APBD. Adapun realisasi program/kegiatan sebagai berikut:

2.1.1 Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Program : Pengembangan Perumahan

Kegiatan : 1. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota;
2. Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus;
3. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan

Program : Kawasan Permukiman

Kegiatan : 1. Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha;
2. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
3. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman

Program : Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)

Kegiatan : Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan

Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan : 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
2. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 s/d Triwulan I

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertamanan Kota Batam

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja 2025)	Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Triwulan I (s.d Maret Tahun Berjalan)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1					2	3	4	5	6 = 5/4*100
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
1	0				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
1	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	25,91%	25,91%
1	0	0	2.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	20%	20%
1	0	0	2.0	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	213 Orang/Bulan	213 Orang/Bulan	100%
1	0	0	2.0	0	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12.00	3 Dokumen	20.20%
1	0	0	2.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	100%	0.00%	0.00%
1	0	0	2.0	0	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	0 Paket	0.00%
1	0	0	2.0	0	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	8 Orang	1 Orang	25.00%
1	0	0	2.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	0%	0.00%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja 2025)	Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Triwulan I (s.d Maret Tahun Berjalan)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	0	0	2.0	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0 Paket	0.00%
1	0	0	2.0	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13 Paket	0 Paket	0.00%
1	0	0	2.0	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	0 Paket	0.00%
1	0	0	2.0	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Paket	0 Paket	0.00%
1	0	0	2.0	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	0 Laporan	0.00%
1	0	0	2.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100%	0.00%	0.00%
1	0	0	2.0	0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	0 Unit	0.00%
1	0	0	2.0	0	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	74 Unit	0 Unit	0.00%
1	0	0	2.0	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	49 Unit	0 Unit	0.00%
1	0	0	2.0	0	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0 Unit	0.00%
1	0	0	2.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100%	0.00%	0.00%
1	0	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	3 Laporan	25.00%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja 2025)	Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Triwulan I (s.d Maret Tahun Berjalan)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	0	0	2.0	0		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3 Laporan	25.00%
1	0	0	2.0			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	100%	0.00%	0.00%
1	0	0	2.0	0		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	0 Unit	0.00%
1	0	0	2.0	0		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28 Unit	2 Unit	14.28%
1	0	0	2.0	0		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	68 Unit	0 Unit	0.00%
1	0	0	2.0	0		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	0	0.00%
1	0	0				PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Relokasi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Ditangani	100%	0.00%	0.00%
							Persentase Rumah Susun Layak Huni	98%	0.00%	0.00%
1	0	0	2.0			Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Terkait Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota di perkotaan	100%	0.00%	0.00%
1	0	0	2.0	0		Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	1 Dokumen	0 Dokumen	0.00%
1	0	0	2.0	0		Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	1 Dokumen	0 Dokumen	0.00%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja 2025)	Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Triwulan I (s.d Maret Tahun Berjalan)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	0	0	2.0	0		Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0 Dokumen	0.00%
1	0	0	2.0			Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Persentase Rumah Susun Umum yang Dikelola	100%	0.00%	0.00%
1	0	0	2.0	0		Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1 Dokumen	0 Dokumen	0.00%
1	0	0	2.0			Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase Dokumen Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan yang di susun	100%	0.00%	0.00%
1	0	0	2.0	0		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	1 Laporan	0 Laporan	0.00%
1	0	0				PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Penurunan Luasan Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan	83.16%	0.00%	0.00%
							Persentase Penurunan Luasan Kawasan Permukiman Kumuh Hinterland	87.97%	0.00%	0.00%
1	0	0	2.0			Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Kawasan Kumuh Dengan Luasan Dibawah 10 (Sepuluh) Ha yang di Tata dan Ditingkatkan	20.28%	0.00%	0.00%
1	0	0	2.0	0		Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	2 Dokumen	0 Dokumen	0.00%
1	0	0	2.0			Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Rumah Tidak Layak Huni yang di Perbaiki di Wilayah Perkotaan	7.97%	0.00%	0.00%
							Rumah Tidak Layak Huni yang di Perbaiki di WilayahHinterland	57,22%	0.00%	0.00%
1	0	0	2.0	0		Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	20 Unit	0	0.00%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja 2025)	Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Triwulan I (s.d Maret Tahun Berjalan)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	0	0	2.0	0		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1 Laporan	0	0.00%
1	0	0	2.0	0		Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	1 Laporan	0	0.00%
1	0	0	2.0	0		Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	57 Ha	0	0.00%
1	0	0				PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman di Wilayah Perkotaan	99.01%	0%	0.00%
							Persentase Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman di Wilayah Hinterland	96.20%	0%	0.00%
1	0	0	2.0	1		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase PSU Perumahan yang Dibangun/ Direhabilitasi/ Dipelihara di Perkotaan	97.88%	0%	0.00%
							Persentase PSU Perumahan yang Dibangun/ Direhabilitasi/ Dipelihara di Hinterland	57,22 %	0%	0.00%
1	0	0	2.0	0		Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	2 Dokumen	0	0.00%
1	0	0	2.0	0		Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	311 Lokasi	0 Lokasi	1.02%
1	0	0	2.0	0		Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	1 Laporan	0 Laporan	0.00%
1	0	0	2.0	0		Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	22 Lokasi	0 Lokasi	8.03%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja 2025)	Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Triwulan I (s.d Maret Tahun Berjalan)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	0	0	2.0	1		Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	1 Laporan	0 Laporan	0.00%
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
2	1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				
2	1	0				PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Luas RTH Publik yang Dikelola	5.46%	0%	0.00%
2	1	0	2.0	1		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase RTH Publik yang Dikelola dalam Kondisi Terpelihara	80.84%%	80.84	100%
2	1	0	2.0	0		Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	24.55 Ha	24.55 Ha	100%
2	1	0	2.0	0		Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	21 Unit	0 Unit	0.00%
2	1	0	2.0	0		Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	132.00 Unit	29 Unit	21.43%
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
1	0					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
0	0	0				PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Relokasi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Ditangani			
1	4	2					Persentase Rumah Susun Layak Huni			

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja 2025)	Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Triwulan I (s.d Maret Tahun Berjalan)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
01425					Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Persentase Rumah Susun Umum yang Dikelola			
01425	0	0	0	2	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	31 Dokumen	0 Dokumen	100%
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
211					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				
2114					PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Luas RTH Publik yang Dikelola			
2114	0	0	0	2	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase RTH Publik yang Dikelola dalam Kondisi Terpelihara			
21141	0	0	0	2	Pengelolaan Kebun Raya	Luas Kebun Raya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Ha	30 Ha	100%

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertamanan, 2025

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertamanan Kota Batam dapat dilihat pada Tabel 2.2 di bawah ini.

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertamanan Kota Batam Tahun 2025 s/d Triwulan I

No	Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertamanan	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2025		Realisasi Kinerja Capaian Renstra Tahun 2025 TW I		Catatan Analisis
		Satuan	Volume	Satuan	Volume	
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase Peningkatan RTH Publik yang dikelola	Persen	0,01	Persen	0,01	
2	Persentase luas ruang terbuka hijau publik dalam kondisi terpelihara	Persen	100,00	Persen	100,00	
3	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Permukiman Perkotaan	Persen	91,00	Persen	0,00	
4	Persentase Rumah Layak Huni Perkotaan	Persen	89,84	Persen	0,00	
5	Persentase Lingkungan Perumahan/ Permukiman yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas yang layak di kawasan perkotaan	Persen	86	Persen	0,00	
6	Persentase Penurunan Luasan Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan	Persen	87,97	Persen	0,00	
7	Persentase Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman di Perkotaan	Persen	99,01	Persen	0,00	
8	Persentase Nilai Capaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Persen	79,79	Persen	<u>71,65</u>	
9	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Permukiman Wilayah Hinterland	Persen	70,19	Persen	0,00	
10	Persentase Rumah Layak Huni di Wilayah Hinterland	Persen	76,00	Persen	0,00	
11	Persentase Lingkungan Perumahan/ Permukiman yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas yang layak di Wilayah Hinterland	Persen	86,07	Persen	0,00	
12	Persentase Penurunan Kawasan Kumuh di Wilayah Hinterland	Persen	83,16	Persen	0,00	

No	Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertamanan	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2025		Realisasi Kinerja Capaian Renstra Tahun 2025 TW I		Catatan Analisis
		Satuan	Volume	Satuan	Volume	
1	2	3	4	5	6	7
13	Persentase Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman di Wilayah Hinterland	Persen	96,20	Persen	0,00	

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertamanan, 2025

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa kinerja yang tercapai di triwulan 1 ini hanya terbatas pada kinerja yang didukung melalui pelaksanaan kegiatan yang bersifat rutin, seperti pengelolaan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau. Selain itu, untuk capaian nilai SAKIP yang menjadi salah satu indikator kinerja kesekretariatan, didasarkan atas hasil penilaian di tahun sebelumnya.

Ketidaktercapaian target kinerja di triwulan pertama merupakan kondisi normal, terutama pada instansi teknis mengingat proses pelaksanaan kegiatan, terutama fisik, yang membutuhkan waktu yang panjang dalam proses persiapan dan penyelenggaraan kegiatannya. Triwulan pertama digunakan sepenuhnya untuk persiapan kegiatan, termasuk proses penetapan P3DN sebagai langkah awal dalam pemilihan barang dan vendor pada proses pengadaan. Selain persyaratan administrasi yang berimbas pada waktu penyelesaian proses pengadaan, tidak ada kendala lain yang secara signifikan mempengaruhi proses pengadaan.

Namun demikian, sebagai salah satu OPD yang berfokus terhadap pemenuhan infrastruktur fisik, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertamanan, dengan dukungan anggaran dari Pemerintah Kota Batam, optimis akan dapat mencapai kinerja secara optimal di akhir tahun anggaran.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Secara umum, terdapat 2 hal yang perlu diperhatikan dalam rangka mewujudkan kinerja dinas yang optimal, yaitu teknis pelaksanaan kegiatan dan ruang lingkup program/kegiatan/sub kegiatan yang menjadi fondasi atas ketercapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah. Jika dilihat dari sisi teknis pelaksanaan kegiatan, terdapat beberapa kendala yang berpotensi menjadi hambatan dalam mencapai target realisasi, diantaranya perubahan sistem pada sistem pengadaan dan proses penetapan P3DN. Hal ini terlihat dari realisasi target pada tabel 2.2 yang belum ideal jika dibandingkan dengan proporsi realisasi yang seharusnya dicapai pada triwulan 1.

Jika dilihat dari sisi ruang lingkup program hingga sub kegiatan yang dipilih, serta pagu anggaran yang ditetapkan pada APBD Murni 2025, terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan kembali sebagai rangkaian langkah dalam mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban. Adapun isu penting dalam pelaksanaan kegiatan ditahun 2025 ini diantaranya :

1. Belum optimalnya pendapatan yang diperoleh dari UPT. Rusunawa dikarenakan infrastruktur yang kurang memadai;

2. Kualitas infrastruktur perumahan yang belum mumpuni, sehingga dapat memberikan dampak katastropik bagi masyarakat;
3. Penataan taman kota dan jalur hijau jalan yang belum optimal dalam mewujudkan ruang terbuka hijau;
4. Rencana pengembangan wilayah Rempang sebagai akibat dari relokasi program pemerintah, membutuhkan kerjasama antara pusat dan daerah;
5. Keterbatasan lahan pemakaman yang berakibat terhadap rencana pemanfaatan hutan lindung.

Selain isu teknis sebagaimana dijabarkan diatas, isu lain yang turut mempengaruhi pencapaian kinerja di tahun 2025 ini adalah efisiensi belanja yang didasarkan atas Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Efisiensi yang dilakukan berakibat terhadap optimalisasi anggaran, dimana keterbatasan anggaran memaksa instansi untuk melaksanakan tupoksinya secara lebih efektif.

Isu-isu inilah yang kemudian menjadi pertimbangan utama dalam pengelolaan anggaran di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertamanan tahun 2025. Jawaban atas isu yang berkembang diwujudkan dalam rencana kerja perubahan dengan harapan dapat memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD

Program dan kegiatan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertamanan Kota Batam pada Tahun 2025 didasarkan pada hasil evaluasi Renja sampai dengan Triwulan I tahun berkenaan dan mengacu pada prioritas Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2025.

Adapun hasil evaluasi menunjukkan perlunya penguatan arah kebijakan anggaran pada :

1. pengelolaan rusunawa yang menjadi wajah nyata dari rumah yang layak dan terjangkau di tengah meningkatnya laju pertumbuhan penduduk, tingginya *demand* rumah, dan isu keterbatasan lahan;
2. peningkatan infrastruktur sebagai langkah penanganan banjir dan longsor yang kerap terjadi di Kota Batam;
3. penyediaan kebutuhan operasional dalam mendukung proses pengembangan wilayah rempang; dan
4. peningkatan taman sebagai langkah serius dalam memberikan ruang terbuka hijau yang ramah, asri, dan nyaman

Program dan Kegiatan serta Sub kegiatan yang mengalami perubahan (penambahan/pengurangan/pergeseran) yaitu sebagai berikut;

Tabel 3.1 Rincian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu pada Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Ket
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN KOTA BATAM						151.381.947.101,00	174.787.248.227,00	(105.377.808.862,00)	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Pelayanan Kesekretariatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertamanan	0	75	27.349.116.599,00	29.044.863.914,00	1.695.747.315,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	100%	100%	21.338.908.951,00	23.714.775.670,00	2.375.866.719,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	213 Orang/Bulan	211 Orang/Bulan	21.164.968.951,00	23.540.835.670,00	2.375.866.719,00	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	173.940.000,00	173.940.000,00	0,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	100%	100%	170.548.000,00	83.704.000,00	(86.844.000,00)	

	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang	6 Orang	170.548.000,00	83.704.000,00	(86.844.000,00)	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100%	100%	952.240.500,00	505.722.900,00	(446.517.600,00)	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	6.972.000,00	13.108.000,00	6.136.000,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13 Paket	13 Paket	390.466.500,00	243.013.900,00	(147.452.600,00)	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	3 Paket	39.390.000,00	20.693.000,00	(18.697.000,00)	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Lapaoran	12 Lapaoran	508.212.000,00	228.908.000,00	(279.304.000,00)	

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	100%	100%	3.592.450.000,00	3.398.676.000,00	(193.774.000,00)	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	1 Unit	860.621.000,00	519.053.000,00	(41.568.000,00)	
	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	74 Unit	74 Unit	194.666.000,00	194.666.000,00	0,00	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	49 Unit	81 Unit	538.918.000,00	686.712.000,00	147.794.000,00	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1.998.245.000,00	1.998.245.000,00	0,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100%	100%	393.676.308,00	444.351.744,00	50.675.436,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	225.900.000,00	225.900.000,00	0,00	

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	167.776.308,00	218.451.744,00	50.675.436,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	100%	100%	901.292.840,00	897.633.600,00	(3.659.240,00)	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	68.648.000,00	68.648.000,00	0,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28 Unit	27 Unit	448.480.000,00	437.380.000,00	(11.100.000,00)	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	68 Unit	51 Unit	46.520.000,00	53.850.000,00	7.330.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	337.644.840,00	337.755.600,00	110.760,00	

	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Relokasi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Ditangani	-	100%	-	16.885.683.612,00	17.715.347.990,00	829.664.378,00	
			Persentase Rumah Susun Layak Huni	Persentase Rumah Layak Huni	85.43%	85.43%				
	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Terkait Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota di perkotaan	Jumlah dokumen penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	100%	3 Dokumen	245.202.000,00	242.812.000,00	(2.390.000,00)	
	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	1 Dokumen	1 Dokumen	74.100.000,00	74.100.000,00	0,00	
	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	1 Dokumen	1 Dokumen	74.400.000,00	74.400.000,00	0,00	
	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	96.702.000,00	94.312.000,00	(2.390.000,00)	
	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum	Persentase Rumah Susun Umum yang Dikelola	Persentase sarusun layak huni	100%	65.95%	8.300.812.000,00	8.870.967.000,00	570.155.000,00	

	Umum dan/atau Rumah Khusus	dan/atau Rumah Khusus								
	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1 Dokumen	1 Dokumen	8.300.812.000,00	8.870.967.000,00	570.155.000,00	
	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase Dokumen Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan yang di susun	Persentase Dokumen Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan yang di susun	100%	100%	188.261.000,00	153.918.000,00	(34.343.000,00)	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	1 Laporan	1 Laporan	188.261.000,00	153.918.000,00	(34.343.000,00)	
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Penurunan Luasan Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan	Persentase Luas Kawasan Kumuh yang ditangani	87,97%	72.46%	7.184.111.170,00	9.841.774.443,00	2.657.663.273,00	
			Persentase Penurunan Luasan Kawasan Permukiman Kumuh Hinterland	-	83,16%	-				
	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	-	1 Laporan	0	521.130.100,00	521.130.100,00	

	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	0	1 Laporan	0	521.130.100,00	521.130.100,00	
	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Kawasan Kumuh Dengan Luasan Dibawah 10 (Sepuluh) Ha yang di Tata dan Ditingkatkan	Jumlah Dokumen Penataan Kawasan Permukiman Kumuh	20,28%	2 Dokumen	984.728.000,00	921.654.000,00	(63.074.000,00)	
	Penyusunan/Review /Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Penyusunan/Review /Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview /Terlegalisasi	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview /Terlegalisasi	2 Dokumen	2 Dokumen	984.728.000,00	921.654.000,00	(63.074.000,00)	
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Rumah Tidak Layak Huni yang di Perbaiki di Wilayah Perkotaan	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang di Perbaiki	7,97%	6.67%	6.199.383.170,00	8.398.990.343,00	2.199.607.173,00	
			Rumah Tidak Layak Huni yang di Perbaiki di WilayahHinterland	-	14,59%	-				
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	20 Unit Rumah	15 Unit Rumah	496.868.000,00	394.228.000,00	(102.640.000,00)	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1 Laporan	1 Laporan	384.684.000,00	198.452.000,00	(186.232.000,00)	

	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	1 Dokumen	1 Dokumen	128.320.000,00	124.250.000,00	(4.070.000,00)	
	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	0,57 Ha	0,57 Ha	5.189.511.170,00	7.682.060.343,00	2.492.549.173,00	
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman di Wilayah Perkotaan	Persentase Perumahan yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	99,01%	100%	75.378.734.480,00	91.751.832.260,00	(48.237.301.651,00)	
			Persentase Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman di Wilayah Hinterland		96,20%	-				
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase PSU Perumahan yang Dibangun/ Direhabilitasi/ Dipelihara di Perkotaan	Jumlah lokasi PSU yang ditangani	97,88%	328 Lokasi	75.378.734.480,00	91.751.832.260,00	16.306.123.780,00	
			Persentase PSU Perumahan yang Dibangun/ Direhabilitasi/ Dipelihara di Hinterland	-	57,22%	-				

	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	2 Dokumen	2 Dokumen	189.080.000,00	189.080.000,00	0,00	
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	311 Lokasi	382 Lokasi	69.035.763.800,00	85.086.092.680,00	(75.497.790.620,00)	
	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	1 Laporan	1 Laporan	1.273.767.680,00	1.381.089.680,00	107.322.000,00	
	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	22 Lokasi	25 Lokasi	4.282.497.000,00	4.575.903.400,00	(8.829.165.700,00)	
	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	1 Laporan	1 Laporan	597.626.000,00	519.666.500,00	(77.959.500,00)	
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Luas RTH Publik yang Dikelola	Peningkatan luas RTH Publik	5,46%	5,92%	24.584.301.240,00	26.433.429.620,00	(8.949.999.130,00)	

	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase RTH Publik yang Dikelola dalam Kondisi Terpelihara	Luas RTH Publik yang Dikelola dalam Kondisi Terpelihara	80,84%	258,11 Ha	24.584.301.240,00	26.433.429.620,00	(8.949.999.130,00)	
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	24.55 Ha	40.77 Ha	7.967.819.900,00	10.364.417.400,00	2.396.597.500,00	
	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Jumlah Unit Taman yang dibangun/ditingkatkan	Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	21 unit	27 unit	5.469.392.700,00	4.821.019.400,00	(3.472.329.600,00)	
	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah unit taman kota dan jalur hijau jalan yang dikelola dalam kondisi terpelihara	132 Unit	130 Unit	9.643.336.840,00	9.708.573.020,00	65.236.180,00	
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Relokasi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Ditangani	Persentase Rumah Layak Huni	100%	100%	8.151.408.612,00	8.447.650.990,00	296.242.378,00	
			Persentase Rumah Susun Layak Huni	-	98%	98%				
	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Persentase Rumah Susun Umum yang Dikelola	Persentase sarusun layak huni	100%	100%	8.151.408.612,00	8.447.650.990,00	296.242.378,00	
	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun	31 Dokumen	31 Dokumen	8.151.408.612,00	8.447.650.990,00	296.242.378,00	

	Rumah Khusus (UPT)	dan/atau Rumah Khusus (UPT)	Umum dan/atau Rumah Khusus	Umum dan/atau Rumah Khusus						
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMA N HAYATI (KEHATI)	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Luas RTH Publik yang Dikelola	Persentase Luas RTH Publik yang Dikelola	5,46%	5,46%	1.503.751.800,00	1.539.419.800,00	35.668.000,00	
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase RTH Publik yang Dikelola dalam Kondisi Terpelihara	Persentase RTH Publik yang Dikelola dalam Kondisi Terpelihara	80,84%	80,84%	1.503.751.800,00	1.539.419.800,00	35.668.000,00	
	Pengelolaan Kebun Raya	Pengelolaan Kebun Raya	Luas Kebun Raya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Luas Kebun Raya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Ha	30 Ha	1.503.751.800,00	1.539.419.800,00	35.668.000,00	

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertamanan, 2025

BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertamanan Kota Batam Tahun 2025 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertamanan Tahun 2025 dalam menunjang tercapainya visi dan misi daerah serta target dan sasaran pembangunan melalui Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) Pemerintah Kota Batam Tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertamanan Kota Batam sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Triwulan I.

4.1 Catatan Penting

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai perangkat daerah yang membidangi urusan terkait Perumahan dan Kawasan Permukiman Serta sebagian urusan Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertamanan Kota Batam masih mempunyai sejumlah pekerjaan yang belum optimal, maka dari itu dalam melakukan kewajibannya perlu untuk segera diselesaikan.

4.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Sebagai uraian akhir pada bab penutup Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertamanan Kota Batam Tahun 2025, maka disampaikan kaidah-kaidah pelaksanaannya bahwa dengan ditetapkannya renja ini, maka:

1. Perubahan Rencana Kerja ini dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertamanan Kota Batam Tahun Anggaran 2025;
2. Perubahan Rencana Kerja ini akan dijadikan pedoman pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah direncanakan untuk mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah.

4.3 Rencana Tindak Lanjut

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai kondisi yang lebih baik di masa mendatang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi sumber daya yang dimiliki. Untuk menjamin agar program kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi mengevaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program dan kegiatan yang telah direncanakan dengan target-target tertentu, dan bagaimana pelaksanaan dari program/kegiatan tersebut oleh masing-masing bidang yang bersangkutan. Dengan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program maupun kegiatan diharapkan mampu untuk mendukung tercapainya target yang telah ditentukan.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertamanan Kota Batam sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan yang mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program dan kegiatan apabila terdapat ketidaksesuaian skenario dari dokumen perencanaan induk daerah (RPJMD) yang berimplikasi/berdampak terhadap dokumen perencanaan ini, maka akan dilakukan evaluasi dan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertamanan Kota Batam Tahun 2025 disusun sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan dan pelaksanaan kegiatan Tahun 2025.

WALI KOTA BATAM

AMSAKAR ACHMAD

